

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Ade Saptono, Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, (Jakarta : PT Grasindo, 2010).

Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum (Analisis Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 sampai dengan 2004), (Ciawi-Bogor : Ghalia Indonesia Cet-I, 2007).

Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD Tahun 1945, disertasi Doktor, (Bandung, 1990).

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001).

Bhenyamien Hoessein, Kebijakan Desentralisasi, (Jurnal Administrasi Negara Vol. 1, No. 2, 2002).

Dede Rosyada *et al.*, Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, cetakan 2, (Jakarta : Tim Icce Uin Jakarta dan Prenada Media : 2005).

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).

Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, cet. 2, (Bandung : Djambatan, 2004).

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).

HAW Widjaja, Otonomi di Titik Beratkan Pada Daerah Tingkat II, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2001).

Inu Kencana Syafei, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).

- I. Nyoman Sumaryadi, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, (Jakarta : Citra Utama, 2005).
- J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007).
- J. Moeleong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994).
- Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005).
- Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003).
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : PT Ghalia Indonesia, 2003).
- P. Joko Subgyo, Metode Penelitian, cetakan kelima, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006).
- R. Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986).
- Soetrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985).
- W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, cetakan kelima (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2008).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.